

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Batam adalah salah satu pusat industri, perdagangan, *transshipment*, dan pariwisata di Indonesia. Batam telah menjadi ujung tombak yang sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi Kepulauan Riau. Dalam laporan (BP Batam, 2023) disebutkan bahwa Batam berperan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, Batam menyumbang sekitar 76% dari total pertumbuhan ekonomi. Sepanjang bulan Mei 2023, nilai ekspor di Kepulauan Riau mencapai USD 1.197,62 juta, mengalami kenaikan sebesar 4,33% dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Total nilai ekspor seluruh Kepulauan Riau tercatat sebesar USD 1.585,14 juta.

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Kepri



Sumber: BP Batam, 2023

Pada tahun 2022, Kota Batam mengalami pertumbuhan ekonomi paling

tinggi diantara Kabupaten/Kota yang ada di Kepulauan Riau. Selain itu, pada tahun 2023 Batam juga menjadi salah satu kontributor utama investasi asing di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, tercatat bahwa 83,6% dari total investasi asing di Provinsi Kepulauan Riau pada semester 1 (Januari-Juni) berasal dari Kota Batam, dengan realisasi investasi mencapai USD 416,4 juta.

Batam yang merupakan salah satu Kota penyumbang perekonomian di Kepulauan Riau akan sangat terpengaruh jika terjadinya inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi dimana harga seluruh barang terus meningkat dan berlaku pada suatu perekonomian tertentu. Dengan meningkatnya inflasi dapat mengancam perekonomian. Tingkat inflasi yang tidak stabil dapat mempengaruhi keputusan investasi. Investor cenderung menghindari area dengan inflasi tinggi karena ketidakpastian ekonomi. Pada tahun 2019 Batam mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,92% kemudian tahun 2020, ekonomi Kota Batam mengalami penurunan, dengan pertumbuhan berada pada angka -2,55% dan naik di tahun 2021 sebesar 4,75%. Penurunan ini disebabkan oleh investasi yang lemah, konsumsi rumah tangga yang menurun, serta penurunan permintaan ekspor. Selain itu, inflasi tahunan pada tahun 2020 Kota Batam sebesar 1,12% juga turut berkontribusi terhadap penurunan tersebut (Banjarnahor & Effendi, 2022).

Berikut adalah tabel tingkat inflasi harga konsumen nasional tahunan (Y-on-Y) tahun 2021-2024:

Tabel 1.1 Tabel Tingkat Inflasi Harga Konsumen Nasional Tahunan (Y-on-Y) Tahun 2021-2024

Bulan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Januari	1,55	2,18	5,28	2,57
Februari	2,38	2,06	5,47	2,75
Maret	1,37	2,64	4,97	3,05
April	1,42	3,47	4,33	3,00
Mei	1,68	3,55	4,00	2,84
Juni	1,33	4,35	3,52	2,51
Juli	1,52	4,94	3,08	2,13
Agustus	1,59	4,69	3,27	2,12
September	1,60	5,95	2,28	1,84
Oktober	1,66	5,71	2,56	1,71
November	1,75	5,42	2,86	1,55
Desember	1,87	5,51	2,61	1,57

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Pada tahun 2021 bulan desember, inflasi nasional berada pada 1,87 persen. Kemudian, di tahun 2022, inflasi naik signifikan mencapai 5,51 persen, yang disebabkan oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Inflasi dari Januari hingga Desember 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021. Harga bahan pokok di tahun 2022 mulai banyak mengalami kenaikan, dan aktivitas ekonomi mulai bergejolak. Selama tahun 2022, inflasi bulanan berfluktuasi dengan pola yang hampir sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan signifikan terjadi pada bulan September 2022, ketika harga BBM bersubsidi mengalami penyesuaian; pertalite naik 30,72%, solar naik 32,04%, dan pertamax naik 16% (Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2024).

Data di atas menunjukkan bahwa inflasi nasional Indonesia mengalami fluktuasi (perubahan yang terjadi secara naik turun atau tidak tetap dalam suatu periode waktu) dari tahun ke tahun, dengan tingkat tertinggi terjadi pada bulan

september 2022 sebesar 5,95% dan terendah pada bulan Oktober 2024 sebesar 1,71%.

Tabel 1.2 Inflasi Provinsi Kepulauan Riau (persen)

Bulan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Januari	0,67	0,69	0,24	0,51
Februari	-0,60	-0,42	0,47	-0,22
Maret	-0,07	0,68	-0,29	0,46
April	0,09	1,09	0,44	0,06
Mei	0,24	0,81	-0,26	0,37
Juni	-0,13	0,84	0,49	0,28
Juli	0,43	0,61	0,27	-0,45
Agustus	-0,42	-0,50	0,16	-0,04
September	0,31	1,06	0,16	-0,14
Oktober	0,30	-0,07	0,33	0,06
November	0,86	-0,20	0,76	-
Desember	0,56	1,11	0,44	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batam, 2024

Tabel di atas merupakan data inflasi gabungan dari dua kota yang ada di Kepulauan Riau. Data ini menunjukkan bahwa inflasi di wilayah gabungan Batam dan Tanjungpinang tertinggi terjadi pada tahun 2022 Desember sebesar 1,11% dan mengalami deflasi di bulan februari sebesar -0,42%, Agustus -0,50%, Oktober -0,07%, dan November sebesar -0,20%.

Tabel 1.3 Inflasi Kota Batam (persen)

Bulan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Januari	0,68	0,74	-0,26	0,58
Februari	-0,60	-0,48	0,50	-0,30
Maret	-0,02	0,73	-0,32	0,45
April	0,15	1,12	0,47	0,09
Mei	0,24	0,79	-0,25	0,39
Juni	-0,15	0,84	0,52	0,29

Juli	0,45	0,61	0,27	0,46
Agustus	-0,44	-0,50	0,17	0,02
September	0,33	1,08	0,12	0,18
Oktober	0,32	-0,04	0,37	0,08
November	0,86	-0,20	0,76	0,22
Desember	0,58	1,14	0,48	0,68

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batam, 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa inflasi di Kota Batam juga mengalami fluktuasi. Inflasi tertinggi terjadi pada Desember 2022 dengan tingkat sebesar 1,14%.

Tabel 1.4 Tabel inflasi Kota Tanjungpinang (persen)

Bulan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Januari	0,56	0,38	-0,11	0,37
Februari	-0,59	0,08	0,32	0,08
Maret	-0,42	0,36	-0,04	0,35
April	-0,36	0,84	0,22	0,04
Mei	0,03	1,02	-0,25	0,32
Juni	-0,02	0,80	0,29	0,16
Juli	0,36	0,66	0,35	-0,64
Agustus	-0,32	-0,54	0,02	-0,06
September	0,19	0,92	0,42	-0,05
Oktober	0,16	-0,34	0,07	0,03
November	0,85	-0,18	0,69	-
Desember	0,86	0,85	0,17	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang, 2024

Berdasarkan tabel di atas dilihat pada November 2021, Kota Batam mencatat inflasi sebesar 0,86% akibat peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,70 pada Oktober 2021 menjadi 106,61 pada November 2021. Inflasi kalender tahun 2021 (Januari-November) mencapai 1,85%, sedangkan inflasi tahunan (November 2021 dibandingkan dengan November 2020) sebesar 2,93%. Kota

Tanjungpinang, sebagai salah satu dari dua kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau, juga mengalami inflasi sebesar 0,85%, sehingga inflasi gabungan dua kota di provinsi ini mencapai 0,86%. Inflasi ini dipicu oleh kenaikan harga di beberapa kelompok pengeluaran, seperti: 1. makanan, minuman, dan tembakau (2,58%), 2. transportasi (0,72%), 3. perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,50%), 4. pakaian dan alas kaki (0,10%), serta 5. perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,03%). Sementara itu, kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah: 1. perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,36%) dan 2. rekreasi, olahraga, dan budaya (0,01%) (Badan Pusat Statistik Kota Batam, 2021).

Komponen bahan pangan merupakan salah satu penyumbang inflasi tertinggi di Kota Batam karena Batam bukan daerah sentra pangan sementara demand relatif tinggi di periode tertentu baik karena Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), libur di Singapura, maupun wisatawan mancanegara. Tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Batam pada tahun 2023 tercatat sebesar 2,85% (yoy) dan bahan pangan tercatat sebagai salah satu penyumbang andil inflasi terbesar (Batampos, 2024).

Keberhasilan pembangunan suatu negara dapat dilihat ketika pembangunan dilakukan secara merata dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, keberhasilan ini juga ditandai dengan meningkatnya pendapatan, terciptanya kesempatan kerja, dan terjaganya kestabilan harga (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022). Untuk mewujudkan hal ini, peran aktif pemerintah sangat diperlukan dalam menjaga kestabilan harga tersebut.

Kestabilan harga bahan pokok adalah salah satu aspek krusial untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengontrol inflasi. Ketidakstabilan harga yang ekstrem bisa mengganggu keseimbangan ekonomi dan berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, Pemerintah bertanggung jawab untuk mengambil tindakan strategis guna memastikan kestabilan harga bahan pokok.

Menurut Nurzana & Novrianti (2024) Harga barang diperkirakan akan mengalami lonjakan signifikan menjelang Lebaran, seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat. Di sisi lain, jumlah barang yang tersedia tetap stagnan atau bahkan mulai berkurang. Dalam kondisi normal, baik kuantitas yang ditawarkan maupun yang dibutuhkan untuk suatu komoditas cenderung stabil, terutama di luar periode perayaan Idul Fitri atau hari raya besar lainnya. Dalam konteks ini, stabilitas tersebut mencakup tidak hanya harga yang tetap, tetapi juga kuantitas barang yang tidak mengalami penurunan. Menjelang Idul Fitri, kenaikan harga kebutuhan pokok diperkirakan akan terjadi tidak hanya di satu daerah, tetapi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan pokok di Indonesia berpotensi menghadapi kenaikan harga menjelang Idul Fitri. Lonjakan harga pangan telah menjadi fenomena tahunan di Indonesia. Peningkatan permintaan barang inilah yang mendorong harga pangan naik. Prinsip dasar ekonomi menyatakan bahwa "jika permintaan meningkat sementara pasokan barang terbatas, maka harga barang akan naik." Namun, peningkatan permintaan ini tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan yang memadai.

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengakui adanya tantangan yang cukup besar yang dihadapi oleh provinsi ini, terutama terkait dengan kondisi geografisnya sebagai daerah kepulauan. Tantangan ini terlihat jelas dalam pemenuhan kebutuhan hasil pertanian yang masih terbatas dan belum mampu mencukupi kebutuhan lokal secara mandiri. Selain itu, faktor-faktor seperti ketidakefisienan dalam sistem logistik, gangguan cuaca, serta kelemahan dalam struktur kelembagaan sektor pangan turut memperburuk situasi dan menambah kompleksitas dalam upaya pengendalian inflasi (Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, 2024).

Sama halnya dengan Batam, saat ini Batam masih bergantung pada pasokan dari luar dan belum mampu mencukupi kebutuhan pangan secara mandiri. Inflasi year-on-year (y-on-y) pada bulan Februari 2024 disebabkan oleh kenaikan harga yang tercermin dari meningkatnya seluruh indeks kelompok pengeluaran, salah satunya adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami kenaikan sebesar 7,33 persen. Beberapa komoditas yang memberikan kontribusi signifikan terhadap inflasi y-on-y pada Januari 2024 meliputi: Cabe, beras, bayam, tarif parkir, angkutan udara, kangkung, sigaret kretek mesin (SKM), kontrak rumah, akademi/ perguruan tinggi, emas perhiasan, tomat, bawang merah, bawang putih, bahan bakar rumah tangga, angkutan laut, kacang panjang, sawi hijau, sewa rumah, tarif rumah sakit, daun bawang, dan susu bubuk.

Untuk menjaga kestabilan harga dan mengontrol inflasi di daerah, pemerintah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pembentukan TPID ini berdasarkan Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2017 tentang Tim

Pengendalian Inflasi Nasional. Dalam Pasal 5, dijelaskan bahwa TPID Kabupaten/Kota memiliki beberapa kewajiban, yaitu mengumpulkan data dan informasi mengenai dinamika harga barang kebutuhan pokok dan penting, serta jasa di tingkat kabupaten/kota. Mereka juga bertanggung jawab menyusun kebijakan pengendalian inflasi di tingkat kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan provinsi. Selain itu, TPID harus melakukan upaya untuk memperbaiki sistem logistik di tingkat kabupaten/kota dan berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi. TPID juga harus melaksanakan tindakan lain untuk mengatasi hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang analis perekonomian, pentingnya peran TPID ini tidak bisa diragukan lagi, penulis memperoleh informasi bahwa TPID Kota Batam menerapkan strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan barang, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif) untuk menjaga kestabilan harga dan mengendalikan inflasi. Dalam hal keterjangkauan harga, TPID Kota Batam berfokus pada penyediaan bahan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Inisiatif yang dilakukan adalah 1. mengoptimalkan kerja sama antar daerah dengan mendatangkan cabai dari Sulawesi Utara, Aceh, dan Jawa Tengah, 2. melakukan pengendalian ekspektasi masyarakat dengan mediseminasikan kecukupan pasokan, 3. bersinergi dengan OPD terkait penyelenggaraan dan fasilitasi Penanaman Serentak Sekolah Menanam (GSM) cabai di 100 SMA/SMK se-Kepri sebanyak 25.000 bibit, 4. melakukan monitoring

budidaya cabai, 5. menggelar Operasi Pasar Murah secara berkala untuk memastikan bahwa masyarakat, terutama kalangan bawah dapat mengakses kebutuhan pokok tanpa beban biaya yang tinggi. Dalam penelitian ini lebih menyoroti Operasi Pasar Murah karena manfaat dari Operasi ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Memperhatikan bahwa Kota Batam memang disiapkan sebagai Kota industri dan wisata, maka pengendalian inflasi lebih difokuskan untuk memastikan kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi untuk menjaga stabilitas harga (Bentan.co.id, 2024). Program Operasi Pasar Murah dilaksanakan dengan Tujuan untuk menekan inflasi khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Ramadhan, idul fitri dan lain sebagainya. Tujuan lainnya yaitu untuk menjamin ketersediaan bahan pokok atau memastikan bahwa kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Operasi pasar murah ini juga dapat membantu masyarakat khususnya di Kecamatan-kecamatan se-Kota Batam untuk meringankan beban biaya hidup masyarakat.

Hal ini dapat dilihat berdasarkan Keputusan Wali Kota Batam No 9 tahun 2024 tentang Tim Operasi Pasar Murah menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024/1445 Hijriah, menimbang bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga kebutuhan bahan pokok dan ketersediaan stok pangan masyarakat saat menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya idul fitri tahun 2024/1445 Hijriah di Kota Batam akan dilakukan Operasi Pasar Murah. Tujuan dari program ini adalah untuk mencegah kenaikan harga pokok. Masalah ini dapat menjadi beban bagi masyarakat yang memiliki pendapatan terbatas dan mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketersediaan Barang, TPID memastikan bahwa ketersediaan barang kebutuhan pokok tetap terjaga di pasaran dengan melakukan koordinasi intensif antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan inspeksi ke pasar dan distributor, serta memantau distribusi dan pasokan barang secara rutin. Selain itu, TPID juga berkolaborasi dengan asosiasi distributor untuk menjaga pasokan kebutuhan pokok.

Kelancaran Distribusi, Untuk mendukung kelancaran distribusi, TPID bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk distributor dan pelaku usaha, untuk menciptakan jaringan distribusi yang efisien. Program ini mencakup dialog langsung dengan distributor untuk memastikan bahwa barang-barang kebutuhan pokok dapat didistribusikan dengan baik ke seluruh wilayah Batam.

Komunikasi yang efektif, diadakan rapat koordinasi/high level meeting TPID dengan tujuan untuk komunikasi yang efektif antar anggota TPID berjalan dengan lancar.

Program Pasar Murah ini dirancang untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tetap terjamin dan menjaga stabilitas harga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Tidak hanya pelaksanaannya saja, program ini juga akan dievaluasi untuk kemungkinan dilanjutkan di tahun berikutnya. Program pasar murah ini menyediakan berbagai bahan pokok penting, seperti beras, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, gula dan daging. Dalam menjalankan program ini, pengambilan keputusan yang efektif melibatkan berbagai faktor, termasuk pemilihan lokasi yang strategis, manajemen persediaan yang baik, serta koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat. Untuk memastikan keberhasilan program ini,

diperlukan adanya penelitian mendalam terkait efektivitas Program Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam dalam menekan inflasi di Kota Batam.

Dari penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk lebih dalam mengkaji tentang operasi pasar murah di Kota Batam. Peneliti ingin mengetahui bagaimana efektivitas program Operasi Pasar Murah di Kota Batam pada tahun 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah meneliti seberapa efektif program Operasi Pasar Murah di Kota Batam tahun 2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana efektivitas program Operasi Pasar Murah di Kota Batam tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala literatur tentang efektivitas program Operasi Pasar Murah di Kota Batam. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi berarti terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam ranah ekonomi dan pelayanan publik. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan wawasan baru dan inovatif yang memperkaya pembahasan akademis serta mendukung perumusan kebijakan yang lebih efektif dan efisien.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti: Penelitian ini bisa menambah pengetahuan bagi peneliti tentang bagaimana efektivitas program yang dijalankan oleh TPID Kota Batam yaitu Operasi Pasar Murah.
- b. Bagi Pemerintah: Penelitian ini dapat membantu pemerintah untuk memberikan gambaran tentang bagaimana efektivitas program Operasi Pasar Murah Kota Batam dan sebagai bahan evaluasi untuk program yang akan dilaksanakan kedepannya.
- c. Bagi Masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dan menjadi informasi yang berguna kepada masyarakat terkait program Operasi Pasar Murah Kota Batam.
- d. Bagi Pengembangan Ilmu Pemerintahan: Penelitian ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan karena menunjukkan bagaimana program Operasi Pasar Murah (OPM) dijalankan melalui kerja sama antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Program ini dirancang melalui koordinasi yang melibatkan berbagai level pemerintahan mulai dari daerah, kota/kabupaten, hingga Kementerian dan pelaksanaannya langsung menyangkut masyarakat sebagai penerima manfaat. Dengan mengevaluasi efektivitas program ini, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian empiris yang memperkaya

pemahaman tentang bagaimana kebijakan pemerintah dapat diimplementasikan secara kolaboratif dan berdampak langsung terhadap masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan praktis bagi perbaikan dan pengembangan program sejenis di masa depan, khususnya dalam konteks pengendalian inflasi melalui intervensi pasar yang partisipatif dan terukur.

